

Jurnal JTik (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)

DOI: <https://doi.org/10.35870/jtik.v9i3.4606>

Persepsi Masyarakat Terhadap Keterlibatan Perempuan dalam Struktur Pemerintahan Desa Gunung Manaon Kecamatan Panyabungan, Mandailing Natal (Perspektif Gender)

Norma Hanisah Nasution¹, Efi Brata Madya^{2*}

^{1,2*} Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

article info

Article history:

Received 19 April 2025
Received in revised form
15 June 2025
Accepted 29 June 2025
Available online July 2025.

Keywords:

Community Perception;
Women's Engagement;
Government Structure of
Gunung Manaon Village;
Panyabungan District;
Mandailing Natal; Gender
Perspective.

Kata Kunci:

Persepsi Masyarakat;
Keterlibatan Perempuan;
Struktur Pemerintahan Desa
Gunung Manaon; Kecamatan
Panyabungan; Mandailing
Natal, Perspektif Gender.


abstract

This study aims to analyze public perception of women's involvement in the government of Gunung Manaon Village, Panyabungan District, Mandailing Natal Village, through a gender perspective with a descriptive qualitative method. The results show that although quota policies open up formal access for women, their participation in decision-making is still hampered by patriarchal norms, gender stereotypes, and biased communication. Some women have begun to participate actively, especially those who have access to education, technology, and social organizations, but this involvement is still limited and not fully supported by the surrounding environment. This study recommends participatory communication strategies, leadership training based on Islamic values, and strengthening the role of the media and community leaders in shaping public opinion that supports gender equality. An integrated approach between affirmative policies and women's capacity building is expected to create a village political climate that is inclusive, fair, and responsive to the needs of all residents regardless of gender.

abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi masyarakat terhadap keterlibatan perempuan dalam pemerintahan Desa Gunung Manaon, Kecamatan Panyabungan, Kelurahan Mandailing Natal, melalui perspektif gender dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa meskipun kebijakan kuota membuka akses formal bagi perempuan, partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan masih terhambat oleh norma patriarkal, stereotip gender, dan komunikasi yang bias. Sebagian perempuan mulai berpartisipasi aktif, terutama yang memiliki akses terhadap pendidikan, teknologi, dan organisasi sosial, namun keterlibatan tersebut masih terbatas dan belum sepenuhnya didukung lingkungan sekitar. Penelitian ini merekomendasikan strategi komunikasi partisipatif, pelatihan kepemimpinan berbasis nilai Islam, serta penguatan peran media dan tokoh masyarakat dalam membentuk opini publik yang mendukung kesetaraan gender. Pendekatan terintegrasi antara kebijakan afirmatif dan peningkatan kapasitas perempuan diharapkan dapat menciptakan iklim politik desa yang inklusif, adil, serta responsif terhadap kebutuhan seluruh warga tanpa memandang gender.

Corresponding Author. Email: efibratamadya@uinsu.ac.id ^{2}.

Copyright 2025 by the authors of this article. Published by Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. 

1. Pendahuluan

Keterlibatan perempuan dalam struktur pemerintahan desa merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan kesetaraan gender dan partisipasi politik yang lebih inklusif di tingkat lokal. Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan representasi perempuan di bidang politik, termasuk di pemerintahan desa, telah didukung oleh kebijakan kuota gender yang bertujuan memastikan kehadiran perempuan dalam posisi pengambilan keputusan. Menurut Tripp & Kang (2008), kuota ini memiliki dampak penting dalam meningkatkan jumlah perempuan yang terlibat, meskipun persepsi masyarakat terhadap kesetaraan gender sering kali menjadi hambatan besar bagi realisasi partisipasi yang setara. Persepsi negatif ini menciptakan tantangan yang tidak hanya berkaitan dengan keberadaan perempuan di posisi formal, tetapi juga dengan kemampuan mereka untuk memengaruhi proses pembuatan kebijakan.

Di Desa Gunung Manaon, Kecamatan Panyabungan, persepsi masyarakat terhadap keterlibatan perempuan di dalam struktur pemerintahan desa dapat dilihat melalui interaksi sosial dan komunikasi di antara anggota komunitas. Kalaramadam (2018) menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pemerintahan lokal dapat mengubah pandangan tradisional tentang peran perempuan dalam masyarakat. Sapkota (2018) menyoroti bahwa keterlibatan perempuan melalui kebijakan kuota tidak hanya meningkatkan peran sosial mereka, tetapi juga meningkatkan mobilitas dan kondisi ekonomi. Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam hal bagaimana masyarakat memandang kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik di desa.

Berdasarkan observasi, peneliti mengidentifikasi bahwa meskipun ada peningkatan representasi perempuan dalam pemerintahan desa melalui kebijakan kuota, tingkat partisipasi aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan masih terbatas. Kakati (2024) menyoroti bahwa meskipun perempuan memiliki akses ke kursi dalam pemerintahan desa melalui kebijakan kuota, seringkali mereka tidak memiliki suara yang kuat dalam debat publik atau perumusan kebijakan. Hal ini

juga terjadi di berbagai wilayah Indonesia, di mana norma-norma gender yang kuat membatasi partisipasi perempuan secara efektif. Penelitian oleh Alex *et al.* (2023) di Aceh, menunjukkan bahwa meskipun kuota gender telah meningkatkan jumlah perempuan dalam posisi formal, norma-norma patriarki tetap mendominasi, yang membatasi ruang gerak perempuan dalam pengambilan keputusan.

Di Desa Gunung Manaon, persepsi masyarakat terhadap keterlibatan perempuan dalam pemerintahan desa dipengaruhi oleh faktor budaya dan sosial yang serupa. Komunikasi yang terjadi di dalam masyarakat mengenai peran perempuan dalam pemerintahan sering kali masih didasarkan pada stereotip gender yang tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan perempuan di dalam struktur pemerintahan belum cukup untuk mengubah persepsi atau sikap masyarakat secara mendalam. Meskipun keterlibatan perempuan secara formal diakui, tantangan dalam komunikasi dan interaksi sosial masih menjadi hambatan bagi partisipasi perempuan yang lebih bermakna.

Burnet (2011) menunjukkan bahwa meskipun peningkatan representasi perempuan dalam pemerintahan dapat menjadi simbol penting dari kesetaraan gender, hal ini belum tentu berbanding lurus dengan pengaruh politik yang mereka miliki. Dalam banyak kasus, perempuan yang terpilih atau diangkat ke posisi pemerintahan masih harus menghadapi tantangan dalam mewujudkan partisipasi yang nyata, terutama ketika persepsi masyarakat tidak mendukung peran mereka sebagai pengambil keputusan. Sarah & Mona (2008) menekankan teori massa kritis, di mana keberadaan perempuan dalam jumlah yang cukup dapat mempengaruhi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan perempuan. Penelitian ini menunjukkan bahwa bukan hanya jumlah, tetapi juga kualitas partisipasi perempuan yang perlu diperhatikan.

Chaerowati *et al.* (2020) menegaskan bahwa kebijakan kuota gender telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan jumlah perempuan di posisi pengambilan keputusan di pemerintahan lokal. Namun, mereka juga mencatat bahwa tantangan budaya dan sosial, terutama dalam masyarakat yang masih didominasi oleh patriarki, tetap menjadi

hambatan besar bagi perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini sangat penting mengingat peran strategis perempuan dalam pembangunan desa. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang bagaimana masyarakat memandang keterlibatan perempuan, kebijakan yang bertujuan meningkatkan partisipasi perempuan mungkin tidak akan berjalan efektif. Lebih jauh lagi, aspek komunikasi memainkan peran penting dalam mengubah persepsi masyarakat, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keberhasilan perempuan dalam menjalankan peran mereka di pemerintahan.

Urgensi penelitian ini juga terletak pada kebutuhan untuk mengidentifikasi tantangan komunikasi yang dihadapi perempuan dalam pemerintahan desa, serta bagaimana mereka dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Mengingat bahwa komunikasi merupakan kunci dalam membangun dukungan masyarakat terhadap keterlibatan perempuan, penelitian ini berpotensi memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan partisipasi perempuan yang lebih bermakna dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih responsif gender di tingkat desa. Dengan memahami persepsi masyarakat dan tantangan yang dihadapi perempuan dalam pemerintahan, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk merumuskan strategi komunikasi yang lebih efektif dalam mendukung partisipasi perempuan di pemerintahan desa. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan program pemberdayaan perempuan di tingkat lokal yang lebih sesuai dengan konteks budaya dan sosial masyarakat setempat.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan pandangan dari Sugiyono (2018) yang mengemukakan bahwa metode kualitatif lebih cocok digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah di mana peneliti merupakan instrumen kunci dalam proses pengumpulan data. Pendekatan deskriptif

digunakan untuk menggambarkan secara rinci kondisi atau fenomena yang ditemukan di lapangan tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Penelitian ini juga mengadopsi metode field research sebagaimana yang dikemukakan oleh Creswell (2013), di mana peneliti terlibat secara langsung terlibat dalam proses penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait fenomena yang diteliti. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, termasuk observasi non-partisipan, wawancara semi-terstruktur, serta studi literatur (Moleong, 2018). Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan Miles & Huberman dalam Chatra *et al.* (2023), yang mencakup tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Agar data yang diperoleh memiliki validitas yang tinggi, teknik uji triangulasi digunakan, di mana peneliti membandingkan berbagai sumber data untuk mengidentifikasi pola yang serupa, sebagaimana yang juga dijelaskan oleh Salam (2023). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil memiliki tingkat akurasi dan kehandalan yang kuat.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Persepsi Gender dalam Keterlibatan Perempuan di Pemerintahan Desa Gunung Manaon

Persepsi gender terhadap keterlibatan perempuan dalam pemerintahan Desa Gunung Manaon, Kecamatan Panyabungan, menunjukkan adanya tantangan yang masih dihadapi perempuan dalam ranah politik lokal. Dalam banyak komunitas pedesaan, perempuan seringkali tersisih dari proses pengambilan keputusan akibat dominasi budaya patriarki. Padahal, seperti dijelaskan oleh Phiri *et al.* (2024), partisipasi perempuan di tingkat lokal merupakan hak dasar yang penting untuk mencapai kesetaraan dan pemberdayaan. Di Indonesia, kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender mulai meningkat, sebagaimana dicatat oleh Purwanti *et al.* (2019), meskipun pelaksanaannya masih belum sepenuhnya optimal. Keterlibatan perempuan dalam politik lokal merupakan bagian penting dari upaya pemberdayaan dan pembangunan berkelanjutan, seperti disampaikan oleh Agustina *et al.* (2023), pemerintahan yang responsif terhadap isu gender

menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut. Namun, kenyataannya di lapangan, terutama di Desa Gunung Manaon, Kecamatan Panyabungan, partisipasi perempuan dalam pemerintahan desa masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan utama berasal dari kuatnya norma sosial dan budaya yang belum sepenuhnya menerima perempuan dalam posisi kepemimpinan. Karena itu, perubahan cara pandang masyarakat menjadi langkah penting untuk membuka ruang yang lebih setara bagi perempuan.

Di Desa Gunung Manaon, pandangan tradisional masih menjadi hambatan bagi perempuan yang ingin terlibat dalam politik, karena mereka dianggap kurang sesuai dengan peran kepemimpinan. Seperti dijelaskan oleh Charani *et al.* (2023), norma budaya sering membatasi ruang gerak perempuan dalam pembangunan pedesaan. Namun, perkembangan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi mulai membuka peluang baru. Dubois (2021) menyatakan bahwa hal tersebut dapat memperkuat partisipasi perempuan melalui akses informasi dan komunikasi yang lebih luas. Peneliti mengidentifikasi bahwa beberapa perempuan di desa ini yang memiliki akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi mulai menunjukkan minat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, meskipun masih menghadapi resistensi sosial.

Selain itu, munculnya kesadaran di kalangan perempuan muda di Desa Gunung Manaon menjadi tanda positif dalam mendorong partisipasi politik yang lebih inklusif. Dalam wawancara, Robiah menyampaikan bahwa perempuan muda kini lebih percaya diri menyuarakan hak-hak mereka dan mulai aktif terlibat dalam politik desa, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Perubahan sikap ini mencerminkan adanya pergeseran pandangan di tingkat lokal terhadap peran perempuan. Kesadaran yang tumbuh ini merupakan langkah penting menuju terciptanya kesetaraan gender, sekaligus memperkuat fondasi bagi partisipasi perempuan yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Temuan Phiri *et al.* (2024) menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi perempuan dalam politik lokal bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara berkembang, terutama yang masih kuat dipengaruhi oleh norma patriarki dan lemahnya

dukungan kebijakan. Hal ini sangat relevan dengan kondisi di Desa Gunung Manaon, di mana struktur sosial yang kaku masih membatasi peran perempuan. Purwanti *et al.* (2019) juga menegaskan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kebijakan tentang kesetaraan gender dalam pemerintahan desa, pelaksanaannya masih belum merata, terutama di wilayah pedesaan yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya patriarkal secara turun-temurun.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan kesetaraan gender di Desa Gunung Manaon, Kecamatan Panyabungan, belum sepenuhnya diterima maupun dijalankan secara efektif. Untuk memahami dinamika ini, Teori Agenda-Setting menjadi relevan, sebagaimana dijelaskan oleh Cangara (2014), bahwa media dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk perhatian publik terhadap isu tertentu. Dalam konteks ini, dukungan dari media lokal dan tokoh-tokoh masyarakat sangat dibutuhkan agar isu kesetaraan gender dapat lebih dikenal dan diperjuangkan. Perempuan di desa ini memerlukan ruang dan dukungan yang memungkinkan suara mereka terdengar dalam proses pengambilan keputusan di pemerintahan desa.

Di Desa Gunung Manaon, komunikasi yang masih bias gender menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perempuan sulit terlibat dalam pengambilan keputusan. Seperti dijelaskan oleh Olayode (2016), bentuk komunikasi yang tidak setara, baik secara verbal maupun nonverbal, sering kali menyingkirkan perempuan dari ruang-ruang penting dalam politik lokal. Hal ini diperkuat oleh konsep Spiral of Silence dari Elisabeth Noelle-Neumann dalam Alfiyani (2018), yang menjelaskan bahwa individu cenderung diam jika merasa pandangannya berbeda dari mayoritas. Dalam masyarakat yang masih kuat memegang norma patriarkal, seperti Gunung Manaon, kondisi ini membuat banyak perempuan enggan berbicara atau terlibat aktif dalam pemerintahan desa.

Hasil wawancara dengan Marolit Harahap dan Sahroni Nasution, mengungkapkan bahwa perempuan masih sering dipandang hanya sebagai pelengkap dalam pemerintahan, bukan sebagai pengambil keputusan. Marolit Harahap menyatakan, "Masyarakat masih memiliki persepsi bahwa

perempuan tidak mampu memimpin, apalagi di tingkat desa.” Pandangan ini mencerminkan kuatnya konstruksi sosial yang membatasi peran perempuan dalam politik lokal. Meski demikian, beberapa perempuan mulai berani menantang anggapan tersebut dengan menunjukkan kapasitas dan keinginan untuk terlibat lebih aktif, menandai adanya perubahan meskipun masih bersifat gradual dan terbatas. Menurut Muhammad Imal Akbar dan Rizky Fadhilah Nasution, meskipun jumlah perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan di pemerintahan desa masih terbatas, peran mereka mulai terlihat, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan program kesejahteraan. Rizky menekankan bahwa keterlibatan perempuan dalam program sosial merupakan langkah awal yang positif untuk memperkuat partisipasi politik mereka. Sementara itu, Sahlia Nasution, tokoh muda desa, mencatat bahwa generasi perempuan muda kini semakin terbuka terhadap dunia politik, didukung oleh akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan teknologi. Ia meyakini, dengan lebih banyak kesempatan dan dukungan, perempuan akan memainkan peran yang lebih besar dalam pemerintahan desa.

Dengan melihat dinamika yang terjadi di Desa Gunung Manaon, peneliti menggarisbawahi bahwa meskipun tantangan terhadap keterlibatan perempuan dalam pemerintahan desa masih kuat, terutama karena norma budaya dan komunikasi yang bias gender, namun perubahan positif mulai terlihat. Dukungan dari tokoh masyarakat, media, serta akses terhadap pendidikan dan teknologi menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi perempuan. Jika kesadaran kolektif terus dibangun dan ruang partisipasi semakin terbuka, maka perempuan memiliki peluang nyata untuk berperan lebih aktif dalam pengambilan keputusan, membawa perubahan yang lebih inklusif dan adil di tingkat pemerintahan desa.

Hambatan dan Peluang bagi Perempuan dalam Politik di Desa Gunung Manaon

Partisipasi perempuan dalam politik di pedesaan, seperti di Desa Gunung Manaon, Kecamatan Panyabungan, masih terkendala oleh budaya patriarki yang kuat. Sejalan dengan pendapat Kasim (2022), masyarakat di desa tersebut cenderung menempatkan

perempuan dalam peran domestik dan menganggap mereka kurang layak untuk memegang posisi kepemimpinan. Menurut Aula (2023), pandangan tersebut diperkuat oleh stereotip gender yang menilai perempuan kurang kompeten dalam pengambilan keputusan politik. Akibatnya, banyak perempuan merasa tidak percaya diri untuk terlibat dalam politik, meskipun mereka memiliki potensi yang tidak kalah dengan laki-laki. Peneliti mencatat bahwa keterbatasan akses terhadap pendidikan dan sumber daya menjadi salah satu hambatan utama bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik di Desa Gunung Manaon. Menurut Aula (2023), rendahnya tingkat pendidikan, khususnya pendidikan politik bagi perempuan, mengurangi peluang mereka untuk bersaing secara setara dengan laki-laki. Hal ini semakin memperkuat ketimpangan gender yang sudah mengakar. Namun demikian, muncul kesadaran baru tentang pentingnya peran perempuan dalam politik, seiring dengan kebijakan pemerintah yang mendorong keterwakilan perempuan. Sejalan dengan Ekawati (2018), kebijakan kuota 30% bagi perempuan di partai politik dan lembaga legislatif menjadi langkah positif untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di tingkat desa.

Meskipun kebijakan kuota memberikan peluang bagi perempuan untuk terlibat dalam politik, pelaksanaannya di tingkat lokal sering kali belum optimal. Seperti dijelaskan oleh Yoteni *et al.* (2023), media massa turut berperan dalam meningkatkan kesadaran politik perempuan, namun pengaruh patriarki dan stereotip masih kuat, termasuk di Desa Gunung Manaon. Berdasarkan wawancara, perempuan seperti Robiah dan Sahlia Nasution mulai terlibat dalam diskusi politik meskipun masih dalam ranah informal. Menurut Muhammad Imal Akbar, mereka menghadapi tantangan dukungan dari keluarga dan lingkungan. Namun, Rizky Fadhilah Nasution mencatat adanya inisiatif perempuan membangun jaringan melalui media sosial sebagai alat edukasi dan mobilisasi.

Merujuk pada penelitian Mayrudin *et al.* (2022), perempuan memiliki kepekaan yang lebih tinggi terhadap isu-isu publik, khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial dan pendidikan. Potensi ini menjadi modal penting dalam mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan

masyarakat desa. Di Desa Gunung Manaon, partisipasi aktif perempuan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi persoalan sosial seperti akses pendidikan dan layanan kesehatan. Menurut Kushandajani *et al.* (2023), program pelatihan politik telah terbukti mampu meningkatkan kepercayaan diri perempuan, bahkan mendorong mereka untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa dan posisi strategis lainnya.

Dalam komunikasi politik, framing menjadi kunci untuk memahami bagaimana isu-isu gender dan keterlibatan politik perempuan dibentuk di masyarakat. Teori ini menjelaskan bahwa cara penyajian informasi oleh media dan aktor politik sangat memengaruhi cara publik memaknai suatu isu. Sejalan dengan Fairuza *et al.* (2023), ruang maya kini dimanfaatkan oleh perempuan sebagai ruang strategis untuk menyebarkan informasi dan membentuk narasi politik yang inklusif. Di Desa Gunung Manaon, peneliti melihat media sosial dapat berfungsi sebagai alat untuk melawan stereotip negatif, membangun citra positif perempuan, dan mendorong penerimaan publik terhadap peran perempuan dalam ranah politik.

Menurut Jabbar *et al.* (2023), komunikasi partisipatif sangat penting dalam mendorong keterlibatan aktif semua pihak, termasuk perempuan, dalam proses pengambilan keputusan politik. Di Desa Gunung Manaon, pendekatan ini membuka ruang bagi perempuan untuk terlibat langsung dalam forum-forum diskusi publik, sehingga mereka tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga berperan sebagai pengambil keputusan. Namun demikian, berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, tantangan terbesar yang dihadapi perempuan adalah minimnya dukungan dari keluarga dan lingkungan. Sahroni Nasution mengungkapkan bahwa meskipun banyak perempuan memiliki potensi politik, mereka masih terhambat oleh norma yang menekankan peran domestik.

Menurut Marolit Harahap dalam wawancara, peluang bagi perempuan untuk terlibat dalam politik di Desa Gunung Manaon masih terbuka lebar, terutama dengan adanya dukungan dari program pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Program pelatihan politik yang telah dilaksanakan di desa tersebut

memberikan dampak positif, mendorong perempuan seperti Robiah dan Sahlia Nasution untuk mulai mempertimbangkan keterlibatan politik secara lebih serius. Meskipun hambatan struktural dan budaya masih ada, potensi perempuan untuk berkembang dalam ranah politik cukup besar. Dengan dukungan media, pelatihan yang berkelanjutan, serta komunikasi yang efektif dan kolaboratif, partisipasi politik perempuan dapat terus ditingkatkan di tingkat lokal.

Peneliti menemukan bahwa hambatan dan peluang bagi perempuan dalam politik di Desa Gunung Manaon berjalan beriringan dalam realitas sosial yang penuh tantangan. Budaya patriarki yang kuat, stereotip gender, serta minimnya dukungan dari keluarga dan akses pendidikan politik menjadi penghalang utama. Namun demikian, peluang tetap terbuka melalui kebijakan afirmatif seperti kuota 30%, pelatihan politik, serta pemanfaatan media sosial dan komunikasi partisipatif. Dukungan dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal turut memperkuat peran perempuan. Dengan peningkatan kapasitas dan kepercayaan diri, perempuan memiliki potensi nyata untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan politik di tingkat desa.

Keterlibatan Perempuan dalam Pemerintahan Desa Gunung Manaon dari Perspektif Komunikasi Islam

Perempuan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal, namun partisipasi mereka sering kali terhambat oleh norma-norma patriarkal dan kurangnya akses terhadap sumber daya politik. Dalam konteks Islam, keterlibatan perempuan dalam politik dan pemerintahan memiliki legitimasi, karena Islam mengakui kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam hal keadilan dan kepemimpinan (Iskandar *et al.*, 2021; Wulandari, 2022). Komunikasi Islam memandang partisipasi aktif perempuan sebagai kontribusi positif yang dapat memperkaya diskursus politik lokal, termasuk dalam pemerintahan desa. Namun, dalam realitas sosial yang patriarkal, perempuan sering kali dihadapkan pada hambatan kultural yang membatasi akses mereka terhadap peran-peran kepemimpinan.

Dalam banyak kasus, hukum Islam sering kali dipersepsikan sebagai alat untuk mempertahankan dominasi laki-laki, terutama dalam konteks keluarga

dan politik. Namun demikian, terdapat bukti bahwa perempuan di berbagai wilayah Indonesia, seperti Aceh dan Kalimantan, telah berhasil berpartisipasi secara aktif dalam politik lokal, meskipun menghadapi tantangan dari norma-norma sosial yang kaku (Alex *et al.*, 2023; Iskandar *et al.*, 2021). Di Desa Gunung Manaon, misalnya, perempuan telah mulai mengambil peran yang lebih aktif. Menurut hasil wawancara dengan Marolit Harahap, seorang perempuan yang terlibat dalam pemerintahan desa, beliau menyebutkan bahwa keterlibatan perempuan saat ini meningkat, meskipun masih ada kendala dari sisi budaya. "Banyak perempuan yang ingin ikut serta, tapi mereka masih takut bicara dalam forum-forum resmi desa," ungkapnya.

Hal ini diperkuat oleh pendapat Muhammad Imal Akbar, yang menyatakan bahwa keberadaan organisasi perempuan seperti Aisyiyah dan Muslimat NU telah memberikan dorongan bagi perempuan untuk lebih percaya diri dalam berpartisipasi. Menurutnya, organisasi-organisasi ini memberikan pelatihan kepemimpinan yang dapat membantu perempuan lebih siap dalam memegang posisi strategis di desa. Rizky Fadhilah Nasution, menekankan bahwa organisasi keagamaan telah menjadi platform penting bagi perempuan untuk membangun jaringan sosial dan politik mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, partisipasi perempuan dalam pemilihan desa juga meningkat, meskipun mereka belum mencapai jumlah yang setara dengan laki-laki.

Sahroni Nasution menjelaskan bahwa meskipun perempuan telah terlibat dalam proses pemerintahan, peran mereka masih sering terbatas pada isu-isu yang dianggap "perempuan", seperti pendidikan dan kesejahteraan. Namun, ada peningkatan minat perempuan dalam urusan pemerintahan yang lebih luas, termasuk ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Iskandar *et al.* (2021) menunjukkan bahwa perempuan yang terlibat dalam organisasi seperti Aisyiyah dan Muslimat NU lebih mungkin untuk terlibat dalam pemilihan umum dan proses pengambilan keputusan di tingkat lokal. Hal ini disebabkan oleh pelatihan dan dukungan yang diberikan oleh organisasi tersebut, yang membantu perempuan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan meningkatkan kesadaran politik

mereka. Alex *et al.* (2023) mengungkapkan bahwa meskipun hukum Islam di Aceh sangat ketat, perempuan di sana tetap berpartisipasi dalam politik lokal. Ini menunjukkan bahwa perempuan dapat berpartisipasi dalam politik meskipun ada tantangan dari sisi hukum dan budaya. Di Aceh, perempuan telah berhasil menjadi anggota parlemen lokal, yang menunjukkan bahwa hukum dan budaya bukanlah hambatan mutlak bagi keterlibatan perempuan dalam politik. Dalam komunikasi Islam, partisipasi perempuan dalam pemerintahan dianggap penting untuk mencapai maqasid al-shariah atau tujuan syariah, yaitu keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan (Wulandari, 2022). Dalam komunikasi Islam, keterlibatan perempuan bukan hanya tentang hak politik, tetapi juga tentang tanggung jawab sosial mereka dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan hasil wawancara, jelas bahwa keterlibatan perempuan dalam pemerintahan desa Gunung Manaon menghadapi tantangan, terutama dari norma-norma sosial yang masih patriarkal. Informan seperti Robiah dan Amir Husin Nasution mengungkapkan bahwa meskipun ada kemajuan, perempuan sering kali masih merasa ragu untuk mengekspresikan pendapat mereka dalam forum-forum resmi desa. Ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk memperkuat pendidikan politik bagi perempuan agar mereka lebih percaya diri dan mampu berpartisipasi aktif dalam pemerintahan. Selain itu, dari perspektif komunikasi Islam, penting untuk melihat bagaimana perempuan dapat memanfaatkan nilai-nilai Islam sebagai alat untuk memperjuangkan hak-hak politik mereka.

Sahlia Nasution menekankan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang maqasid al-shariah dapat membantu perempuan untuk merumuskan argumen yang lebih kuat dalam memperjuangkan partisipasi mereka dalam pemerintahan desa yang menunjukkan bahwa pendidikan agama yang inklusif dan berperspektif gender dapat memainkan peran penting dalam memberdayakan perempuan di tingkat desa. Keterlibatan perempuan dalam pemerintahan desa Gunung Manaon masih memerlukan dukungan lebih lanjut dari sisi kebijakan dan pendidikan. Dukungan dari organisasi keagamaan dan pemimpin lokal sangat penting untuk memastikan bahwa perempuan tidak

hanya menjadi partisipan pasif, tetapi juga menjadi aktor yang aktif dalam pengambilan keputusan. Ini dapat dicapai melalui sinergi antara kebijakan yang mendukung dan peningkatan literasi politik serta agama di kalangan perempuan.

Dari perspektif komunikasi Islam, keterlibatan perempuan dalam pemerintahan Desa Gunung Manaon merupakan bagian penting dari tanggung jawab sosial yang setara antara laki-laki dan perempuan. Islam tidak membatasi peran perempuan dalam ruang publik, justru mendorong partisipasi aktif dalam kebaikan bersama. Hal ini ditegaskan dalam Alquran surat At-Taubah ayat 71, "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar..." (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019) Ayat ini menekankan bahwa keduanya memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat. Dengan dukungan kebijakan yang adil dan pendidikan politik yang berperspektif Islam, perempuan dapat tampil sebagai pemimpin yang berkontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola desa yang berkeadilan, sejahtera, dan inklusif.

Pembahasan

Keterlibatan perempuan dalam pemerintahan Desa Gunung Manaon memperlihatkan dinamika sosial yang kompleks. Meskipun kebijakan afirmatif seperti kuota gender telah diadopsi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi hambatan struktural dan kultural yang signifikan. Budaya patriarki yang mengakar kuat, sebagaimana tercermin dalam persepsi masyarakat, membatasi ruang gerak perempuan untuk berpartisipasi secara setara dalam proses pengambilan keputusan. Stigma dan stereotip gender yang melekat mengakibatkan perempuan kerap dianggap kurang layak menduduki posisi kepemimpinan, sehingga partisipasi mereka sering kali hanya bersifat simbolis. Fenomena ini tidak hanya terjadi di tingkat lokal, tetapi juga merupakan refleksi dari tantangan yang dihadapi perempuan di berbagai negara berkembang. Kebijakan yang secara formal mendukung kesetaraan gender belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif, terutama di wilayah pedesaan yang masih menjunjung tinggi norma tradisional. Dalam konteks

ini, peran media dan tokoh masyarakat menjadi sangat penting dalam membentuk opini publik dan mendorong perubahan cara pandang terhadap peran perempuan di ranah politik.

Temuan lapangan menunjukkan adanya pergeseran, meskipun masih terbatas, terutama di kalangan perempuan muda yang mulai menunjukkan keberanian untuk terlibat dalam diskusi dan proses politik. Akses terhadap pendidikan dan teknologi informasi menjadi faktor pendorong yang cukup signifikan, memberikan peluang bagi perempuan untuk membangun kapasitas diri dan memperluas jaringan. Namun, resistensi sosial masih menjadi tantangan utama, terutama ketika perempuan harus menghadapi tekanan dari lingkungan keluarga dan masyarakat yang belum sepenuhnya menerima kehadiran mereka di ruang publik. Keterlibatan perempuan dalam program-program sosial dan pengelolaan keuangan desa menjadi langkah awal yang dapat memperkuat posisi mereka dalam struktur pemerintahan. Partisipasi aktif dalam bidang-bidang ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi dan sensitivitas yang tinggi terhadap isu-isu kesejahteraan masyarakat. Potensi ini seharusnya dapat dioptimalkan melalui pelatihan politik dan kepemimpinan yang berkelanjutan, serta dukungan dari organisasi masyarakat sipil dan lembaga keagamaan.

Dari sisi komunikasi politik, masih terdapat kecenderungan bias gender dalam interaksi sosial di desa. Komunikasi yang tidak setara, baik verbal maupun nonverbal, sering kali menyingkirkan perempuan dari ruang-ruang pengambilan keputusan. Konsep Spiral of Silence menjelaskan bagaimana perempuan cenderung memilih diam ketika merasa pandangannya berbeda dengan mayoritas, sehingga suara mereka kurang terdengar dalam forum-forum resmi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi komunikasi partisipatif yang mampu membuka ruang dialog dan mendorong perempuan untuk lebih percaya diri dalam menyampaikan aspirasi.

Dari perspektif komunikasi Islam, legitimasi partisipasi perempuan dalam pemerintahan seharusnya tidak lagi menjadi perdebatan. Nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial yang diajarkan dalam Islam memberikan landasan kuat bagi

perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan desa. Organisasi keagamaan seperti Aisyiyah dan Muslimat NU terbukti mampu meningkatkan kepercayaan diri dan kapasitas politik perempuan melalui pelatihan dan penguatan jaringan sosial. Namun, masih diperlukan upaya sistematis untuk memperluas cakupan pendidikan politik yang berperspektif gender dan agama, sehingga perempuan dapat tampil sebagai aktor utama dalam tata kelola pemerintahan desa. Perubahan menuju tata kelola desa yang lebih inklusif dan adil sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan afirmatif, penguatan kapasitas perempuan, serta dukungan kolektif dari masyarakat, media, dan organisasi keagamaan. Transformasi sosial tidak dapat dicapai hanya dengan pendekatan formal, melainkan memerlukan perubahan paradigma yang mendalam di tingkat komunitas. Dengan demikian, peluang perempuan untuk berkontribusi secara nyata dalam pemerintahan desa akan semakin terbuka, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang menjadi pijakan utama pembangunan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Persepsi gender di Desa Gunung Manaon masih didominasi oleh pandangan patriarkal yang membatasi peran perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Namun, jika perempuan tetap bekerja dan terlibat aktif dalam pemerintahan desa, hal ini berpotensi mengubah cara pandang masyarakat secara perlahan. Keterlibatan mereka tidak hanya memperkaya proses pengambilan kebijakan yang lebih inklusif, tetapi juga membuka ruang partisipasi bagi perempuan lainnya. Dalam perspektif komunikasi Islam, partisipasi ini sejalan dengan maqasid al-shariah yang menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bersama. Dengan dukungan pendidikan, pelatihan kepemimpinan, serta peran organisasi keagamaan, perempuan dapat tampil sebagai agen perubahan yang mampu memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih adil dan merata.

5. Daftar Pustaka

Agustina, I. F., Sukmana, H., & Setiawati, T. (2023).

Breaking barriers: Gender mainstreaming for good governance and sustainable development (pp. 282–288). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-052-7_32

Alex, N., Nasiwan, Abdillah, & Haris, M. (2023). Women in local politics: Insights from Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 36(1), 126–140.

<https://doi.org/10.20473/mkp.V36I12023.126-140>

Alfiyani, N. (2018). Media sosial sebagai strategi komunikasi politik. *Potret Pemikiran*, 22(1).

Aula, M. R. (2023). Isu gender mengenai keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 8(2), 186–201. <https://doi.org/10.35706/jpi.v8i2.9859>

Burnet, J. E. (2011). Women have found respect: Gender quotas, symbolic representation, and female empowerment in Rwanda. *Politics & Gender*, 7(3), 303–334. <https://doi.org/10.1017/S1743923X11000250>

Cangara, H. (2014). *Komunikasi politik: Konsep, teori, dan strategi*. Rajawali Pers.

Chaerowati, D. L., Yuliati, N., & Rochim, M. (2020). Building women's resources in local politics: A case of Indonesia Political Women's Caucus Karawang. In *Proceedings of the 2nd Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2019)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200225.081>

Charani, M. S., Hasanati, S., & Rijanta, R. (2023). Mapping the inhibiting factors of women's role in rural development: A case study of Bejjong Village, East Java Province. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1264(1), 012038. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1264/1/012038>

Chatra, M. A., Achjar, K. A. H., Ningsi, Rusliyah, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data*. Sonpedia

Publishing Indonesia.

- Creswell, W. J. (2013). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Pustaka Belajar.
- Dubois, E. (2021). African women, ICT and neoliberal politics, by Assata Zerai: A review by Elisabeth Dubois. *Information Polity*, 26(2), 211–213. <https://doi.org/10.3233/IP-219003>
- Ekawati, E. (2018). Keterwakilan perempuan pada pemilu pasca Orde Baru. *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 16(1), 67–80. <https://doi.org/10.14421/musawa.2017.161.67-80>
- Fairuza, H., Rastikasari, D., & Rahmansyah, N. N. (2023). Transformasi political awakening perempuan: Komunitas virtual sebagai wujud peran pemuda melalui platform internet sebagai public sphere dalam era digital. *Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia*, 4(2), 97–106. <https://doi.org/10.59784/glosains.v4i2.422>
- Iskandar, I., Ahmad, Z., & Abdul Halim, A. (2021). Collaboration to increase women's political participation in East Kalimantan Governor Election. In *Proceedings of the 5th International Conference on Indonesian Social and Political Enquiries, ICISPE 2020, 9-10 October 2020, Semarang, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.9-10-2020.2304810>
- Jabbar, Akbar, M., & Karnay, S. (2023). Analisis upaya politisi perempuan Polewali Mandar dalam membangun citra politik di Facebook. *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(10), 8284–8290. <https://doi.org/10.54371/jhip.v6i10.3092>
- Kakati, B. K. (2024). Can reservation ensure women's participation in local governance: A study among Tiwas. *Journal of the Anthropological Survey of India*, 73(1), 44–56. <https://doi.org/10.1177/2277436X231192278>
- Kalaramadam, S. (2018). Presence into participation and representation. *Journal of South Asian Development*, 13(1), 1–23. <https://doi.org/10.1177/0973174118757630>
- Kasim, S. S. (2022). Pengaruh budaya patriarki pada peran politik perempuan dan pengambilan kebijakan publik di parlemen. *Journal Publicubo*, 5(2). <https://doi.org/10.35817/jpu.v5i2.24734>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kushandajani, Fitriyah, Alfirdaus, L. K., & Martini, R. (2023). Kemandirian perempuan pedesaan dalam menentukan pilihan politik di ranah pemilihan kepala desa: Studi perilaku memilih dari dimensi sosiologi dan psikologi. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 14(2), 269–286. <https://doi.org/10.14710/politika.14.2.2023.269-286>
- Mayrudin, Y. M., Nurrohman, B., & Astuti, D. S. (2022). Eksistensi politik kader perempuan pada pengorganisasian partai-partai politik. *Ijd-Demos*, 4(3). <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i3.323>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Rosdakarya.
- Olayode, K. O. (2016). Women's participation and gender issues in local governance in Nigeria. *African Research Review*, 10(5), 94. <https://doi.org/10.4314/afrev.v10i5.7>
- Phiri, K., Ndlovu, S., Khumalo, S., Ncube, S. B., & Nyathi, D. (2024). Multiplying faces and amplifying voices: Do women's lives matter in local governance politics in Gwanda, Zimbabwe? *Journal of Asian and African Studies*, 59(5), 1484–1499. <https://doi.org/10.1177/00219096221137658>
- Purwanti, A., Ispriyarso, B., Wijaningsih, D., & Setiawan, F. A. (2019). Examining local policy to improve women's participation in village

- politics: A case study in Semarang Regency, Indonesia. In *Proceedings of the 6th International Conference on Community Development (ICCD 2019)*. <https://doi.org/10.2991/iccd-19.2019.22>
- Rosyidin, I. (2015). Dinamika politik Indonesia kontemporer perspektif komunikasi politik. *Jurnal Dialog*, 38(2).
- Salam, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Azka Pustaka.
- Sapkota, K. R. (2018). Participation and challenges faced by the women's elected in local level government at Bharatpur Metropolitan City, Chitwan, Nepal. *BMC Journal of Scientific Research*, 2(1), 68–78. <https://doi.org/10.3126/bmcjsr.v2i1.42733>
- Sarah, C., & Mona, L. K. (2008). Critical mass theory and women's political representation. *Political Studies*, 56(3), 725–736. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2007.00712.x>
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Tripp, A. M., & Kang, A. (2008). The global impact of quotas. *Comparative Political Studies*, 41(3), 338–361. <https://doi.org/10.1177/0010414006297342>
- Wulandari, W. R. (2022). Egalitarianism: Consciousness-raising in women's position in the Islamic family. *SASI*, 28(3), 447. <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i3.1021>
- Yoteni, A. A., Nurlatifah, N. D., & Pramana, R. (2023). Peran media massa dalam mendorong partisipasi politik perempuan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. *Action Research Literate*, 7(9), 72–78. <https://doi.org/10.46799/ar.v7i9.158>.